



**SAMBUTAN REKTOR PADA PENGUKUHAN
Prof. Dr. ISMI DWI NURHAENI, M.Si SEBAGAI GURU BESAR
BIDANG ADMINISTRASI NEGARA PADA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA**

Bismi'l-Lahi'r-Rahmani'r-Rahim

Assalamu'alaikum wa'r-rahmatu'l-Lahi wa barakatuhu

Yth. Para Guru Besar dan Anggota Senat Universitas,

Yth. Rektor/Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta,

Yth. Rekan-rekan Para Guru Besar Tamu,

Yth. Para Pejabat MUSIDA Jawa Tengah

Yth. Para Bupati dan Pejabat di lingkungan eks Karesidenan Surakarta

Yth. Para Tamu Undangan dan hadirin, khususnya Prof. Dr. Ismi Dwi Nurhaeni, M.Si beserta keluarga yang berbahagia,

Syukur Alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul dalam Pengukuhan Guru Besar Prof. Dr. Ismi Dwi Astuti Nurhaeni, M.Si sebagai guru besar Bidang administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret Surakarta. Beliau adalah profesor ke 143 di UNS dan kelima di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UNS. Sampai dengan upacara pengukuhan kali ini, Guru Besar yang aktif berjumlah 96 orang dan 16 Guru Besar Emeritus.

Hadirin tamu undangan yang saya muliakan,

Sungguh merupakan kebahagiaan bagi seluruh warga kampus bahwa pada hari ini, kampus UNS bertambah seorang professor yang *concern*

dalam Bidang Ilmu Administrasi Negara yang berkaitan dengan gender. Saya selaku pribadi dan institusi mengucapkan selamat atas pengukuhan ini, semoga Prof. Dr. Ismi Dwi Nurhaeni, M.Si, akan menjadi seorang ilmuwan yang lebih produktif dalam berkarya dan berkontribusi positif bagi masyarakat luas. Seperti diungkapkan oleh sejarawan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo, bagi seorang ilmuwan sejati, mesti mengingat untuk **tidak mengikuti** pepatah pohon pisang yang hanya sekali saja berbuah selama hidupnya.

Dengan mencermati *track record* Prof. Dr. Ismi Nurhaeni, M.Si, saya optimis, berbagai karya dan produk yang bernilai tinggi akan segera muncul pasca pengukuhan ini. Di sisi lain, dalam bersikap dan bertingkah laku, hendaknya ilmuwan menjunjung tinggi filosofi padi, semakin berisi semakin merunduk. Dengan memegang prinsip ini, kampus akan berisi oleh ilmuwan yang tidak saja pintar dalam ilmu, tetapi juga santun dalam bersikap dan bertindak. Apalagi bagi ilmuwan yang memiliki basis gender dan gerakan perempuan, memiliki tugas yang tidak ringan namun mulia. Karena itulah kiprah dan kontribusinya benar-benar ditunggu oleh kampus dan masyarakat luas.

Hadirin yang berbahagia,

Bertambahnya guru besar patut kita syukuri bersama, karena mutu dan eksistensi UNS akan semakin kokoh. Idealnya, dengan jumlah mahasiswa sekitar 33.000, jumlah profesor UNS sebesar 10%. Ke depan, tantangan perguruan tinggi akan semakin kuat sehingga memerlukan sosok yang profesional dalam bidangnya. Tanggung jawab yang akan disandang oleh Prof. Dr. Ismi Dwi Nurhaeni, Msi akan semakin besar. Tantangan juga terletak pada Fakultas Ilmu Sosial dan

Politik UNS, utamanya dalam kerangka mengembangkan kinerja Tri Dharma Perguruan Tinggi yang lebih berkualitas.

Kepada para *stakeholders* baik sipil maupun militer khususnya di eks Karesidenan Surakarta, saya atas nama institusi turut mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Saya juga mempersilahkan para pakar terkait yang dimiliki UNS, dalam kesempatan kali ini, pakar kebijakan publik Prof. Dr. Ismi Dwi Nurhaeni, M.Si untuk bisa diperan sertakan dalam proses pembangunan nasional dan daerah sesuai bidang ilmunya.

Hadirin yang berbahagia,

Dikaitkan dengan kebijakan publik (baca: kebijakan pemerintah) yang berbasis gender, ternyata masih menyiasakan berbagai problem di sana-sini. Belum lagi masalah keadilan dan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dalam bidang politik, kita masih ingat pada Pemilu 2009 lalu sudah muncul kebijakan yang cukup responsif yang berkaitan dengan isu gender. Pada waktu itu, isu gender ditandai oleh masih rendahnya partisipasi politik dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif pada setiap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Padahal, aturan keterwakilan kuota 30% wakil rakyat sudah diterapkan pada waktu itu. Namun, kenyataan menunjukkan, gambaran umum tentang partisipasi politik perempuan di Indonesia memperlihatkan representasi yang rendah pada semua tingkatan pengambilan keputusan, seperti tingkat eksekutif, legislatif, yudikatif, birokrasi pemerintahan, partai politik, dan kehidupan publik lainnya.

Berdasarkan data DPR–RI tahun 2007 sebagai hasil Pemilu 2004 persentase anggota perempuan adalah 12,36 % atau 68 orang dari 550 orang anggota legislatif. Jumlah keterwakilan perempuan selama 9 kali Pemilu memperlihatkan fluktuasi yang naik turun yang tidak signifikan. Pemilu pertama tahun 1955, keterwakilan perempuan hanya mencapai 6,3% atau sejumlah 17 orang dari 272 orang anggota legislatif. Pemilu 1987, keterwakilan perempuan mencapai paling tinggi yaitu 13% atau sejumlah 65 orang perempuan dari 500 orang legislatif. Namun, pada pemilu tahun 1997 menurun kembali menjadi 9% dan terakhir pada pemilu tahun 2004 jumlah keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif di setiap daerah pemilihan hanya dapat mencapai kenaikan yang tidak signifikan yaitu 11% (www.menegpp.go.id).

Hadirin yang saya muliakan,

Bagaimana dengan anggaran pemerintah, sejauhmana anggaran pemerintah responsive terhadap gender? Kita semua memahami bahwa selama ini komitmen pemerintah Indonesia guna mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai bidang pembangunan belum menunjukkan hasil yang optimal. Kesenjangan yang masih terjadi diakibatkan oleh terdapatnya kesenjangan antara kebijakan yang berpihak pada keadilan gender dengan cara pemerintah melakukan pengalokasian serta penggunaan anggarannya.

Secara umum, anggaran pemerintah daerah di Indonesia belum memiliki perspektif gender. Anggaran tersebut lebih merupakan alokasi keuangan yang bersifat *aggregate*, sehingga faktor manusia secara sosial dan budaya yang berbeda, bahkan dibedakan, tidaklah terpikirkan. Hal ini yang kemudian membuat kebijakan yang bias (Mundayat, Aris, dkk. 2006:hlm 2-3).

Bapak/Ibu sekalian yang saya hormati,

Demikian sambutan saya, atas perhatiannya diucapkan banyak terima kasih. Atas kekurangan yang ada, saya mohon dimaafkan.

Semoga Allah SWT meridhoi niat langkah kita, memajukan UNS.

Bilahi taufik wal hidayah,

Wassalamu alaikum wa'r-rahmtu'l-Lahi wabarrakatuhu.

Surakarta, 5 Mei 2011

Rektor,

Prof. Dr. H. Ravik Karsidi, MS